

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentan Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Darus, M. Luthfan Hadi, dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mirta Wacana Media, Jakarta.
- Lumban Tobing, G. H. S., 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Bandung
- Kohar, A, 2005, *Hukum Kenotariatan*, 2005, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, Saka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Penerbit Central Of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Pilto, A, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta.



- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Situmorang, M Viktor, Cormentyna Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suryana, Ida Rosida, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- _____ dan Mamudji, S, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, *Hukum Pembuktian*, 2001, Cet. 13, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulhan, Irwansyah Lubis dan Anhar Syanel, *Profesi Notaris dan Pejabat Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.



B. Tesis

Fitrianningsih, Elva, 2009, “Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Apabila Terjadi Sengketa Perdata”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kasmawati, 2017, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tarakan Nomer: 21/Pdt.G/PN.Tar)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pratiwi, Dhewinta Sanggah, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4432 yang dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Pdt/2017 .

D. Artikel/Jurnal

Puspa, Whenahyu Teguh, “Tanggung jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris”, *Jurnal Reportorium*, Volume III, No. 2, 2 Juli-Desember 2016.

H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April, 2006.

E. Internet

Alfi, Renata “Perbedaan Akta yang dibuat oleh Notaris dan Akta yang dibuat dihadapan Notaris”, *Hukum Online*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/perbedaan-Akta->



[yang-dibuat-oleh-Notaris-dengan-Akta-yang-dibuat-di-hadapan-Notaris/](#),
diakses pada 21 Januari 2019 pukul 00.35 WIB.